

	News Title : Harga Acuan CPO Indonesia Kini Tak Lagi Bergantung Malaysia dan Rotterdam	
	Media Name : medcom.id	Journalist : Husen Miftahudin
	Publish Date : 15 October 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Bursa CPO

HOME — EKONOMI — BISNIS



Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Foto: Biro Humas Kemendag

Harga Acuan CPO Indonesia Kini Tak Lagi Bergantung Malaysia dan Rotterdam

Husen Miftahudin • 15 Oktober 2023 11:00

Jakarta. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan perdagangan pasar fisik minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Bursa Berjangka Indonesia pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Peluncuran Bursa CPO ini merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Selain itu, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendorong pembentukan harga acuan CPO.

"Peluncuran Bursa CPO Indonesia ini merupakan terobosan peralihan tata kelola perdagangan CPO di bursa berjangka yang dilakukan dalam upaya memperkuat kinerja perdagangan CPO sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia," kata Zulkifli dikutip dari keterangannya tertulis, Minggu, 15 Oktober 2023.

Selain itu, lanjut dia, peluncuran Bursa CPO merupakan bentuk komitmen Kemendag dalam mendorong terbentuknya harga acuan CPO yang transparan, akurat, tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah, maupun kecil petani [kelapa sawit](#).

Zulhas, sapaan akrabnya, juga menjelaskan Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia, namun belum memiliki harga acuan sendiri. Harga patokan ekspor CPO saat ini bersumber dari Rotterdam dan Malaysia.

"Melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka di Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan pelaku pasar CPO ke depan. Indonesia belum memiliki harga acuan CPO, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia," sebut Zulhas.

Mendag mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku usaha jika harga acuan masih bersumber dari negara lain. Kondisi ini juga berdampak di hilir, misalnya untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi.

"Untuk itu, pemerintah memfasilitasi melalui terbentuknya Bursa CPO Indonesia ini agar ke depan bisa menjadi market influencer bagi dunia," ujar dia.

Baca juga:

[Kementerian ATR Jamin Legalitas HGU Sawit, Bili Alasannya](#)

Produk: CPO Indonesia

Mendag menekankan, CPO merupakan komoditas strategis Indonesia. Pada 2022, produksi CPO Indonesia mencapai 46,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 29,62 miliar. Pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat 20,86 juta ton atau lebih tinggi 15,74 juta ton dibanding Malaysia.

Selain itu, kata Mendag, perdagangan CPO di bursa diharapkan menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit atau kebun kelapa sawit untuk melakukan transaksi komoditasnya dengan harga kompetitif.

"Peluncuran Bursa CPO Indonesia juga merupakan komitmen Kemendag dalam menciptakan ekosistem perdagangan [CPO](#)," tambah Zulhas.

Mendag memperjelas, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) No 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Walaupun kebijakan ini bersifat sukarela (voluntary).

"Kebijakan perdagangan CPO harus cepat beradaptasi dengan pergerakan pasar yang dinamis. Kebijakan ini juga harus dipastikan mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," imbuh dia.

Ia pun berharap, Bursa CPO Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam mendorong transaksi CPO.

"Kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, saya yakin target Perba ini akan terlaksana dengan baik, dan Bursa CPO Indonesia menjadi acuan harga di Indonesia. Terbentuknya Bursa CPO harus mendorong penguatan perdagangan CPO dan mendukung Indonesia menjadi market influencer di pasar global," tutur Zulhas.

Mendag juga menyebutkan, ke depan, Kemendag akan mengatur tata kelola ekspor CPO yang akan memfasilitasi pelaku usaha melalui Bursa Berjangka oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri.